

ABSTRAK

Perlindungan hukum jurnalis dan kemerdekaan pers memprihatinkan, dewan pers dianggap tidak penting, dan penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal perdata dan pidana. Padahal, menurut putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1608k/Pid/2005, penghukuman dengan pemidanaan tidak menguntungkan pers bebas dan malah membahayakannya, sehingga tata cara non pidana harus digunakan. Ini karena sengketa pers bukanlah tindak pidana.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan metode library research, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi/ atau kedudukan dewan pers sekarang ialah sebagai lembaga independen setelah disahkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sehingga sekarang pemerintah tidak lagi ikut campur lagi atas apa yang dilakukan dewan pers. Dewan pers sendiri dibentuk guna melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Jika seorang jurnalis menjadi sebuah terdakwa kasus pelanggaran kode etik di pengadilan maka dewan pers bisa menjadi saksi ahli seperti keterangan yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan masalah pers hanya bisa diselesaikan di ranah pers apabila adanya pelanggaran kode etik. Meskipun negara ini adalah negara hukum, masalah hukum yang berkaitan dengan pers harus diselesaikan oleh pers, bukan oleh hukum biasa. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pers merupakan bagian penting dari suatu negara, dan karena masalah pers telah diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan.

Kata Kunci: Eksistensi Dewan Pers – Sengketa Pers – Kemerdekaan Pers

ABSTRACT

The legal protection of journalists and press freedom is a concern, the press council is considered unimportant, and law enforcers tend to use civil and criminal articles. In fact, according to the decision of the Supreme Court (MA) Number: 1608k/Pid/2005, punishment by punishment does not benefit the free press and actually endangers it, so non-criminal procedures must be used. This is because press disputes are not a criminal offense.

In this research, normative legal research method is employed, implementing library research method, commonly known as literature review research method.

The results of this research show that the existence/or position of the press council now is as an independent institution after the enactment of Law No. 40 of 1999 concerning the Press. So now the government no longer interferes with what the press council does. The press council itself was formed to protect the freedom of the press from interference from other parties. If a journalist becomes a defendant in a case of violating the code of ethics in court, the press council can become an expert witness as explained in the Supreme Court's decision. This is because press problems can only be resolved in the press area if there is a violation of the code of ethics. Even though this country is a country of laws, legal issues related to the press must be resolved by the press, not by ordinary law. This is due to the fact that the press is an important part of a country, and because press matters are regulated by various laws and regulations.

Keywords: Existence of the Press Council – Press Disputes – Press Freedom